

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEMARITIMAN (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)

Arfandi, S.Sos & Dr. Oksep Adhayanto, SH. MH

Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Sebagai Negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah satunya Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan didukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi geografis dengan dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas. Pariwisata sebagai industri multi sektoral melibatkan banyak unsur dan aspek di dalam pengembangannya, sehingga dengan demikian di dalam pengembangannya sangat dibutuhkan sebuah kebijakan sebab kebijakan merupakan dasar pijakan di dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman di lihat dari proses implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata. Proses implementasi diukur melalui variabel yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga menghambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal tersebut akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokus kepada pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman.

Kata kunci: Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata Maritim

PENDAHULUAN

Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, maupun Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Daerah (Negara) maritim, hal tersebut bisa di lihat dari kondisi geografis yang lebih di dominasi oleh laut atau perairan (Oksep Adhayanto, 2014:140). Sebagai daerah (Negara) maritim, focus pembangunan pada sektor kemaritiman wajib untuk di perhitungkan. Mengingat sumber daya alam maritim yang ada merupakan sebuah modal yang berpotensi besar bagi pembangunan perekonomian Daerah (Negara).

Berbicara dalam konteks pembangunan di bidang kemaritiman salah satunya akan berbicara pada konteks pembangunan di bidang pariwisata sebab kemaritiman menyangkut banyak bidang yang salah satunya pariwisata (Daeng Ayub, 2014:6-9). Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu Kabupaten yang terlatak pada wilayah administrative Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Daerah maritim, Potensi Sumber Daya Alam (SDA) maritim Kepulauan Anambas sangat beragam, yang salah satunya sektor pariwisata. Pembangunan pada sektor pariwisata maritim di tunjang dengan letak strategis Kepulauan Anambas yang berada pada pengembangan jalur *New Regional Cruise Corridors* dari Singapura-Manila-Hongkong.

Pariwisata Berbasis Kemaritiman merupakan segala bentuk kegiatan wisata yang di dukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang tersediapada objek-objek wisata maritim. Selanjutnya Wisata Maritim merupakan segala bentuk kegiatan perjalanan dengan berbagai tujuan untuk mengunjungi objek-objek wisata yang berhubungan dengan laut, daerah pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Penggunaan istilah maritim sebagai penyanding kata wisata atau pariwisata di karenakan maritim memiliki makna yang lebih luas di bandingkan istilah laut

ataupun bahari. Laut merupakan tempat berkumpulnya air asin sedangkan bahari merupakan sesuatu yang lebih ke arah kebudayaan (Daeng Ayub, 2014:6). Subandono (2013:2) mengartikan Maritim sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah pesisir (*Coastal*), Pulau kecil (*Small Island*), dan laut (*Ocean*). Sehingga dengan demikian, penulis lebih tertarik untuk menyandingkan kata pariwisata dengan istilah maritim, hal ini di dasarkan maritim memiliki pengertian yang lebih luas dan tepat pada focus penelitian ini di bandingkan istilah laut atau bahari.

Berangkat dari kondisi geografis dan letak yang strategis serta dukungan SDA yang lebih terdepan pada sektor kemaritiman, maka pembangunan pariwisata lebih di arahkan kepada pembangunan pariwisata berbasis kemaritiman. Pembangunan pariwisata maritim merupakan salah satu bentuk otonomi yang bertanggung jawab sebagai langkah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat daerah guna terwujudnya tujuan dari otonomi Daerah Kepulauan Anambas itu sendiri.

Pembangunan sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan, menurut IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) dalam (Spillane, 2002:87) keunggulan tersebut di antaranya;

1. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi baik bagi daerah maupun negara.
2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya.
3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi.
4. Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi.
5. Penghasil devisa.

6. Pemicu perdagangan international.
7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan
8. Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Dengan demikian, berdasarkan dari keunggulan-keunggulan tersebut, perhatian terhadap pembangunan sektor pariwisata maritim di Kepulauan Anambas telah di upayakan ke dalam berbagai bentuk kebijakan. Melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025, Kepulauan Anambas masuk ke dalam rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang di arahkan pada pembangunan pariwisata maritim. Begitu juga halnya dengan perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan pariwisata di Daerah Kepulauan Riau. Melalui RIPPDA tahun 2012-2022, Kepulauan Anambas masuk ke dalam rencana pengembangan Korridor Pariwisata Daerah (KPD) yang juga di rahkan pada focus pengembangan pariwisata maritim.

Berdasarkan berbagai perhatian dalam bentuk kebijakan di atas, bentuk-bentuk perhatian kebijakan di atas di tujukan untuk mendorong dan mendukung berkembangnya pembangunan sektor pariwisata maritim di Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten baru masih belum memiliki perencanaan pembangunan sektor pariwisata dalam bentuk RIPPDA. Sementara kebijakan RIPPDA sangat di butuhkan dalam proses pembangunan pariwisata itu sendiri. Kebijakan merupakan landasan pijakan bagi pembangunan pariwisata baik pariwisata secara umum maupun pariwisata maritim. Dengan tanpa adanya RIPPDA sehingga pengembangan

pariwisata Kepulauan Anambas masih harus mengacu kepada perencanaan RIPPDA Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya dengan tidak tersedianya RIPPDA bagi pengembangan pariwisata Kepulauan Anambas, maka melalui Rencana Strategis (RENSTRA) pariwisata akan di lihat bagaimana dan seperti apa kebijakan pengembangan pariwisata maritim di Kepulauan Anambas. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta dibantu dengan survei, penggunaan deskriptif ditunjukkan untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dalam bentuk kata-kata maupun bahasa yang berkaitan dengan prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan para pembuat dan pelaksana kebijakan.

KERANGKA TEORI

1. Standar dan Sasaran Kebijakan.

Pariwisata yang merupakan industri multi sektoral melibatkan banyak *stakeholder* dalam proses pengembangannya, maka dengan demikian pengembangan pariwisata dalam hal ini pariwisata berbasis kemaritiman membutuhkan dukungan atas sebuah kebijakan yang memiliki kejelasan dari apa yang menjadi standar kebijakan serta sasaran yang seperti apa yang ingin di capai dari kebijakan tersebut. Standar dan sasaran dari kebijakan tersebut agar jelas dan terukur maka dibutuhkan sebuah *standar operasional prosedur* (SOP) yang bisa di jadikan sebagai pedoman pelaksanaan. sebab dengan tidak

adanya SOP di dalam pengembangan pariwisata akan memicu terjadinya multiinterpretasi atau distorsi antar berbagai pihak yang mudah menimbulkan konflik antar agen implementasi.

2. Sumber Daya

Cakupan dari sumber daya di dalam teori ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam di sini di maksudkan pada objek-objek yang memiliki daya tarik dan keindahan yang di kemas menjadi sebuah produk wisata. Sedangkan sumber daya manusia di sini dimaksudkan pada subjek-subjek atau orang/sekelompok orang sebagai pelaku pelaksana kebijakan.

Berangkat dari penjelasan di atas yang dimaksudkan sebagai sumber daya alam kebijakan ialah segala sesuatu yang di jadikan sebagai objek pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman. Sedangkan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di sini dimaksudkan sebagai orang atau sekelompok orang selaku agen pelaksana kebijakan.

3. Hubungan Antar Organisasi

Implementasi dari kebijakan pengembangan pariwisata melibatkan berbagai pihak sebab pariwisata merupakan industri multisektoral. Dari pemahaman di sini agar terwujudnya pengembangan pariwisata yang terarah dan maju di butuhkan koordinasi antar berbagai pihak, sebab Di dalam proses aktivitas implementasi kebijakan di sini, beberapa pihak terkait selaku pelaksana kebijakan di antaranya: dinas pariwisata selaku pelaksana teknis, sektor swasta selaku pengelola objek wisata, dan komponen masyarakat.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana di dalam teori ini mencakup: struktur birokrasi, pola-pola dan norma-norma yang berlaku di lingkup instansi birokrasi, dalam hal ini instansi dinas pariwisata. Dengan demikian karakteristik dari instansi dinas pariwisata meliputi struktur organisasi dinas pariwisata, pembagian kewenangan, hubungan antar unit dalam dinas pariwisata, serta hubungan dinas pariwisata dengan instansi lain.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

Selanjutnya, keberhasilan dari Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di anambas juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial (mencakup dukungan dan pandangan masyarakat anambas), kondisi ekonomi (kemampuan dan keterbatasan ekonomi), serta kondisi politik (mencakup dukungan dan pandangan para elit politik). Kondisi sosial berkaitan dengan pandangan, dukungan maupun keikutsertaan masyarakat Anambas di dalam proses pengembangan pariwisata berbasis Kemaritiman di Anambas, sedangkan kondisi ekonomi berkaitan dengan sumber dana serta dukungan dana yang di alokasikan bagi pengembangan pariwisata berbasis maritim di Anambas, selanjutnya bagian kondisi politik, berkaitan dengan dukungan dari para elit politik dalam proses pengembangan pariwisata berbasis Kemaritiman di Kabupaten Kepulauan Anambas.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan pengembangan pariwisata maritim Kepulauan Anambas berstandar pada RENSTRA pariwisata yang di susun oleh dinas pariwisata selaku

penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Selanjutnya melalui RENSTRA tersebut, pengembabangan pariwisata maritim anambas di wujudkan ke dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW). Berdasarkan RIPOW, pembangunan pariwisata daerah Kepulauan Anambas mengemban Visi:“Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Destinasi WisataBahari Terkemuka di Provinsi Kepulauan Riau”

Berdasarkan Visi di atas, berbagai upaya untuk memajukan dan lebih mengembangkan Destinasi Wisata Maritim di Kepulauan Anambas dalam bentuk kebijakandi antaranya: penetapan peraturan bupati nomor 147.A tentang destinasi unggulan daerah yang salah satunya merupakan objek wisata maritim, yakni objek wisata pantai padang melang. Selanjutnya kebijakan *entry point* wisatawan mancanegara dan asia tenggara yang sedang dalam tahap pengupayaan.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas, yang menjadi permasalahan utamanya adalah tidak tersedianya *Standart Operasional Prosedur* (SOP) di dalam pengembangan pariwisata itu sendiri, sehingga dalam mewujudkan tujuan dari apa yang menjadi sasaran akan sedikit terkendala dan terpengaruhi.

b. Sumber Daya

Sumber Daya Alam (SDA) pariwisata Kepulauan Anambas tersebar dan hampir terdapat pada setiap Kecamatan, dalam hal ini, SDA pariwisata yang di jadikan objek penelitian yakni; Pantai Pasir Manang, Pulau Bawah, Pantai Padang Melang dan Pulau Durai. Berbagai upaya untuk menarik minat kunjung wisatawan di antaranya telah di lakukakannya kegiatan vestifal seperti; vestifal padang melang, mincing mania dan lomba jongkong. Selanjutnya agar objek dan daya tarik wisata kepulauan anambas lebih di kenal secara luas di

lakukannya promosi melalui *Website* sebanyak 2 (dua) *PC*, social media, Brosur/Peta Wisata, *Booklet/DVD* wisata, buku *Explore Anambas*, Kepulauan Anambas *Exotic Island* dan sebagainya.

Lebih lanjut, dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah pegawai pada dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga sebanyak 54 orang yang terdiri dari 1 orang S2, 13 orang S1, 11 orang D3, dan 29 orang SMA. Berbagai upaya untuk meningkatkan kreatifitas dan ketempilan SDM salah satunya telah di lakukannya pelatihan berupa *Traveling* dan *Hotel* hasil kerjasama dengan pihak perusahaan CONOCO PHILIPS.

c. Koordinasi

Berbagai bentuk upaya koordinasi yang di lakukandi antaranya, koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam bentuk Perencanaan dan Pemetaan Kawasan-Kawasan Pariwisata, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam bentuk pengembangan akses jalan dan jembatan/dermaga, koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam bentuk kajian ekosistem dan kelestarian lingkungan, koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir, serta koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam bentuk pengamanan objek-objek wisata.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan, dan Bidang Olah Raga. Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Pemuda Dan Olah Raga di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian, dalam satu kelembagaan menyelenggarakan empat unsur kedinasan sekaligus.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

Kondisi sosial masyarakat masih kurang memberikan dukungan dalam keikutsertaan pengembangan pariwisata maritim di kepulauan anambas, hal ini tampak dari keikutsertaan mereka dalam bentuk usaha-usaha kepariwisataan maritim yang pada objek-objek wisata maritim, perhatian akan kebersihan lingkungan alam maritim dan sebagainya. Selanjutnya kondisi politik memberikan dukungan dalam bentuk realisasi alokasi anggaran ekonomi bagi pengembangan kepariwisataan anambas secara umum.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat.

a. Faktor Pendukung.

- 1) Pada tingkat Nasional, perhatian Negara terhadap pembangunan di sektor pariwisata di wujudkan ke dalam bentuk RIPPARNAS tahun 2010-2025. Melalui kebijakan tersebut, Anambas termasuk ke dalam 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Pengembangan DPN Anambas di arahkan kepada pengembangan pariwisata maritim.
- 2) Pada tingkat Provinsi, perhatian pemerintah Provinsi terhadap pengembangan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di wujudkan ke dalam bentuk kebijakan RIPPDA tahun 2012-2022. Melalui kebijakan tersebut Kepulauan Anambas masuk ke dalam pengembangan Koridor Pariwisata Daerah (KPD) sebagai kawasan pengembangan wisata maritim dan ekowisata.

- 3) Pada tingkat daerah, Perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pembangunan pada sektor pariwisata di wujudkan ke dalam bentuk tersusun nya Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW). Berlandaskan dokumen tersebut, pengembangan pariwisata Anambas lebih di fokuskan terhadap pengembangan objek-objek wisata maritim.
- 4) Kondisi geografis Anambas yang lebih di dominasi oleh perairan menjadikan Kepulauan Anambas sebagai daerah maritim yang lebih memiliki kekayaan SDA di bidang kemaritiman, kekayaan SDA tersebut menjadi sebuah modal yang berpotensi bagi pengembangan pariwisata maritim di Kepulauan Anambas.
- 5) Letak strategis yang berada di jalur New Regional Cruise Corridors dari Singapura–Manila– Hongkong menjadikan anambas sebagai daerah yang sangat strategis sebab terletak pada jalur lintasan pelayaran yang di pergunakan untuk penjelajahan, ekspedisi dan penyelaman sebagai bagian dari aktivitas wisata perjalanan kapal pesiar.

b. Faktor Penghambat

- 1) Tidak atau belum adanya kebijakan dalam bentuk RIPPDA bagi pengembangan pariwisata di kepulauan anambas menyebabkan tidak atau kurang teridentifikasinya objek-objek wisata maritim yang lebih berpotensi serta tidak tersedianya indikasi dari program pengembangan pariwisata itu sendiri.
- 2) Tidak tersedianya RIPPDA tersebut berdampak kepada SOP di dalam pengembangannya, pembangunan SDM pariwisata, bentuk-bentuk koordinasi yang kurang terealisasi, serta dukungan masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi.

KESIMPULAN

Kebijakan pengembangan pariwisata maritim Kepulauan Anambas berstandar pada RENSTRA pariwisata yang di susun oleh dinas pariwisata selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Selanjutnya melalui RENSTRA tersebut, pengembabangan pariwisata maritim anambas di wujudkan ke dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW). Lemahnya standar kebijakan dalam mencapai sasaran dari pembangunan pariwisata tersebut berdampak pada tidak tersedianya SOP, program dan kegiatan pengenalan objek wisata dalam bentuk festival bertemakan maritim serta pengenalan ke dunia luar dalam bentuk promosi. Peningkatan keterampilan SDM kepariwisataan yang berarah pada kepariwisataan maritim, koordinasi-koordinasi dalam perwujudan di lapangan, karakteristik agen pelaksana yang luas dan menghambat ruang gerak penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri serta koondisi masyarakat yang belum berkontribusi dalam proses pengembangan pariwisata maritim di Kepulauan Anambas.

Kebijakan pengembangan pariwisata di anambas masih belum mengarah kepada pengembangan pariwisata maritim. Meskipun visi dari pengembangan pariwisata di anambas mengarahkan kepada pengemba-ngan pariwisata maritim, namun di lapangan hal tersebut masih tampak bertolak belakang dari apa yang di harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adisasmita, Raharjo, 2013 "Pembangunan Ekonomi Maritim" Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi, 2006 "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Ali, Hasyimi. A, 2002, "Organisasi dan Manajemen", Jakarta: Bumi Aksara
- Azam dan Mendra, 2011 "system pemerintahan Daerah" Pekanbaru: Alaf Riau
- Effendi, S dan Tukiran (Eds), 2012 "metode penelitian survei", Jakarta: LP3ES
- Kuncoro, Mudrajad, 2004 "Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang", Jakarta: Erlangga
- Loriaux, Robert Iwan, 2009 "Potensi dan pengembangan Wisata Bahari Provinsi Kepulauan Riau" Dalam Natuna, Daeng Ayub, Dkk (Eds) "Pendidikan dan Pembangunan berbasis Maritim", Pekanbaru: UR Press
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 2007, "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru", Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2009 "Metodologi Penelitian" Jakarta: Bumi Aksara
- Natuna, Daeng Ayub, Dkk (Eds), 2009, "Pendidikan dan Pembangunan Berbasis Maritim", Pekanbaru: UR Press
- Nugrogho, D Riant, 2003 "Kebijakan Publik, Formasi, Implementasi dan Evaluasi" Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pitana dan Gayatri, 2005 "Sosiologi Pariwisata" Yogyakarta: ANDI
- Sugiyono. 2003 "Metode Penelitian Administrasi Negara" Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi, 2010 "Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial" Bandung: Alfabeta
- Spillanne, James J, 2002, "Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya". Jakarta: Kanisius
- Syafiie, Kencana. I, 2011 "Pengantar ilmu pemerintahan" Yogyakarta: Rafika Aditama
- Syarifudin, 2008, "Efektivitas Kebijakan Pendidikan" Jakarta: PT Rineka Cipta
- Subarsono, AG, 2010 "Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi", Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, "Kybernologi: Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan" Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Widodo, Joko, 2012 "Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi, Analisis, Proses Kebijakan Publik" Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi, 2012 "Kebijakan Publik: Teori, Proses Dan Studi Khusus" Yogyakarta: CAPS
- Yoeti, Oka A, 2008, "Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Aplikasi" Jakarta: Kompas

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan daerah anambas

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional 2010-2025

Peraturan Daerah Kepri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2012-2022

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015

Rencana Strategis Pariwisata kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015

Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber Internet dan Website

Baiquni, 2014, "Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim" http://maritim.wg.ugm.ac.id/?attachment_id=171, Akses: 11 Mei 2015

Subandono, 2013 "Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Perpektif Menjaga Kedaulatan dan Kesejahteraan Masyarakat" http://maritim.wg.ugm.ac.id/?attachment_id=174, Akses: 11 Mei 2015